



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. USAHA MULIA DIGITAL INDONESIA**

**TENTANG
DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS RISET DAN
DIGITAL**

NOMOR : PAS-24.HH.05.05 TA 2021

NOMOR : 003/UMDI/PKS/IX/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14 - 09 - 2021)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **ANIS ELIYANA** : selaku Direktur PT. Usaha Mulia Digital Indonesia beralamat di Jl. Gandaria No. 24 H, Jakarta Selatan 12620 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Usaha Mulia Digital Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Sistem Pemasarakatan Berbasis Riset dan Digital dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Dukungan Sistem Pemasarakatan Berbasis Riset dan Digital.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberikan dukungan terhadap pengembangan Sistem Pemasarakatan berbasis riset dan digital;
 - b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pemasarakatan berbasis riset dan digital.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Assessment Kebutuhan Pengembangan Sistem Pemasarakatan;
- b. Riset Proses Bisnis Pemasarakatan;
- c. Penyusunan *Policy Brief*;
- d. Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasarakatan;
- e. Dukungan digitalisasi proses bisnis Pemasarakatan; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dihasilkan atau berhubungan dengan kerja sama ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - e. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan dan peralatan pendukung;
 - c. Menerbitkan sertifikat pelatihan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun;
 - b. Melaksanakan riset proses bisnis masyarakat;

- c. Melaksanakan dukungan pengembangan sistem informasi pemasyarakatan berbasis digital;
- d. Melaksanakan program kerja sama;
- e. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

REYNHARD SILITONGA

PIHAK KEDUA,

ANIS ELIYANA